

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 DI KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN

Muhayat¹, Rumzi Samin², Edy Akhyari³, **Ismandianto^{4*)}**

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia

⁴Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia
ismandianto@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Aparat pemerintah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Mantang. Perangkat daerah dan organisasi terdepan dalam pelaksanaan misi pelayanan daerah secara langsung dan efektif ditentukan oleh kedekatan antara organisasi penyedia layanan kepada masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. Metode digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian dalam implementasi kebijakan implementasi PP No. 17 Tahun 2018 yaitu belum dilaksanakan sebagai komitmen penuh di tingkat kecamatan. Permasalahan utama pelayanan kecamatan adalah fitur geografis yang masih terisolir, infrastruktur pendukung minim dan kemampuan sumberdaya manusia perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan dan Kecamatan.

ABSTRACT

Government officials are the front guard in providing services to the community in sub-district. Regional apparatus and leading organizations in implementing regional service missions directly and effectively are determined by the closeness between organizations providing services to the community. The research aims to analyze the implementation of Government Regulation Number 17 of 2018 in District, Bintan Regency. The method used in research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques were obtained through interviews, observation and document study. The results of research in the implementation of PP no. 17 of 2018, which has not been implemented as a full commitment at the sub-district level. The main problems with sub-district services are geographical features that are still isolated, minimal supporting infrastructure and human resource capabilities need to be improved.

Keywords: Implementation, Policy and Sub-District.

PENDAHULUAN

Kebebasan yang diserahkan kepada pemerintah daerah bagi pengambil keputusan politik untuk menentukan, mengurus dan menyelenggarakan kepentingan rakyat di daerah otonomnya sangat jelas tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi negara sesuai dengan Keputusan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, aparat kecamatan seringkali menghadapi persoalan yang menghambat pelaksanaan kebijakan secara maksimal untuk masyarakat. Memang implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan publik merupakan ilmu terapan (Agus Purwanto, 2017) keberhasilan kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah publik (Situmorang, 2016) kebijakan publik adalah setiap keputusan yang diambil oleh negara (Alfarizi, 2018) Implementasi kebijakan merupakan kegiatan

terencana yang dilakukan dengan sangat serius berdasarkan standar tertentu yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu (Afandi, M. I., 2015) Standar kebijakan dan tujuan harus jelas dan terukur agar dapat dicapai (Wijaya & Aprilia, 2020)

Setiap kebijakan negara memiliki resiko kegagalan yang tinggi(Siregar, 2022) Disini terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan karena keterbatasan kemampuan masing-masing entitas untuk menerima dan menerapkan ketentuan/kecenderungan yang disebabkan oleh kompleksnya keadaan implementasi kebijakan(Arifin Tahir, 2014) Formulasi Kebijakan berasal atau berasal dari kebijakan publik(Ed, 2015) Kebijakan framework merupakan faktor penting bagi organisasi dalam mencapai tujuannya(Damanik & Iskandar, 2019) Kebijakan publik memerlukan kegiatan sosialisasi, implementasi kebijakan dan pemantauan (Samodra.W.Dk, 2017) pelayanan publik, diskresi dapat digunakan (Mansur, 2021) Konsistensi, transparansi, akuntabilitas, pemerataan, efisiensi dan efisiensi (N.D, 2017) Isi Kebijaksanaan Tidak perlu membakukan pandangan ketika menafsirkan kebijakan. mplementasi kebijakan publik merupakan salah satu langkah terpenting dalam semua tahapan kebijakan publik. Implementasi adalah fase siklus politik dari keseluruhan proses politik yang berlangsung dalam sistem politik yang kompleks dan dinamis serta menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan (Alfarizi, 2018) Daerah, Keppres, Penetapan Presiden, Putusan Pengadilan, Komunikasi dan sumber daya perlu ditingkatkan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik sambil menerapkan pedoman disposisi dan struktur birokrasi dengan benar (Tri Asyafin Putra & Widiyarta, 2022) tindakan, melainkan tindakan yang secara serius direncanakan dan dilaksanakan atas dasar standar tertentu guna mencapai tujuan operasi tertentu (Saadah, 2017) Kebijakan tidak memiliki arti penting jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan (Hadi, 2000) Kebijakan tidak memiliki makna atau arti ketika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan (Ananda et al., 2021; Ismandianto, 2019) James P. Laster dan Joseph Stewart (2000) berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu langkah terpenting dalam kebijakan publik. Penegakan kebijakan dapat menjadi alat manajemen hukum di mana pemangku kepentingan, organisasi, proses, dan teknologi bekerja sama untuk mencapai dampak atau uang yang diinginkan dari kebijakan.

Permasalahan kajian ini adalah bagaimana Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang bidang studi dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan rumusan masalahnya sulit, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 1. Peta Kabupaten Bintan
Sumber: Pemerintah Kota Bintan, 2022.



Karena kurangnya administrasi kecamatan, Camat sering mengalami kesulitan dalam memahami struktur birokrasi ketika memenuhi kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota, yang berarti peraturan yang ada tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Karena pembagian beberapa. Tidak ada kewenangan yang kuat dalam melaksanakan tugas di berbagai bagian atau departemen. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Perpu No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tentang Perda No. 7 Tahun 2016, Perubahan Perbup No. 8/2009 tentang pengalihan sebagian kewenangan gubernur di Camat. Model implementasi kebijakan yang tepat menurut G. Edwards III, 1980 memiliki empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan/kecenderungan dan struktur organisasi dalam PP Implementasi Kebijakan No. 17 Tahun 2018 di Kabupaten Mangar Provinsi Bintan, untuk menjamin implementasi kebijakan dari Keputusan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Mangar Kabupaten Bintan untuk menelaah, membantu dan mencegah.

Selanjutnya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif atau dirumuskan kecamatan mantang, maka implementasi kebijakan menitikberatkan pada kebijakan, tentang masyarakat (Mazmanian dan Sabtier, 1979). Menurut Hogwood dan Gunn (1986), ada beberapa alasan mengapa penting untuk memahami implementasi kebijakan publik, yaitu: Program seringkali tidak dilaksanakan tepat waktu sehingga menyebabkan keterlambatan implementasi. Penelitian ini dapat memberikan informasi implementasi kebijakan peraturan nomor 12 Tahun 2018 yang berguna untuk pengembangan pengetahuan administrasi yang berkaitan dengan daerah dalam hal sumber daya, komunikasi, tata letak dan struktur birokrasi, dan dalam praktiknya kami berharap hasil penelitian ini dapat mempengaruhi pemerintahan Kabupaten Bintan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan kinerja dalam memberikan pelayanan publik melalui komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi.

METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2015) yang menelaah implementasi PP Nomor 17 Tahun 2018 terkait dengan daerah kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Hasil dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mangar Kabupaten Bintan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, telaah dokumen termasuk peraturan (undang-undang dan praktik), buku, artikel penelitian, berita di media cetak dan elektronik, dan laporan kerja daerah/Kelurahan. kewenangan daerah. Dalam studi ini, teknik yang ditargetkan digunakan untuk mengidentifikasi persoalan. Artinya informan dipilih menurut kriteria tertentu, atau orang yang dipercaya memahami masalah yang diteliti, sehingga informasi tersebut cocok untuk penelitian yang dilakukan melalui wawancara. Sumber data yang diperoleh peneliti untuk penelitian ini adalah sumber langsung (data primer) dari data/responden yang teridentifikasi di Kabupaten Bintan. Selain itu, informasi sekunder dikumpulkan dari dokumen tertulis yang melengkapi informasi dasar.(Prastowo, 2016).

Sumber data penelitian ini berasal dari dua unsur, yaitu pejabat/pegawai eks Kantor Kedaulatan Bintan dan pemerintah kota. Sumber data yang direncanakan adalah 1 orang manager, 1 orang dari kbid, kemudian 8 pertemuan dari 4 kecamatan (2 orang tiap kecamatan).



PEMBAHASAN

Dimensi komunikasi pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan

Komunikasi adalah kegiatan yang mengajak orang lain untuk menginterpretasikan suatu gagasan, terutama yang dimaksud oleh pembicara atau penulis, melalui sistem yang sama, baik itu simbol, tanda, atau perilaku. Komunikasi mempengaruhi implementasi kebijakan publik, dan komunikasi yang buruk dapat berdampak negatif terhadap implementasi kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi penyampaian tindakan publik adalah penyampaian, koherensi, dan kejelasan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik dengan sukses, praktisi perlu tahu persis apa yang harus dilakukan. Tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga kesenjangan antara rencana dan implementasi kebijakan dapat dikurangi. Jika komunikasi informasi tentang tujuan kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas, kelompok sasaran kemungkinan akan menolak (Afandi, M. I., 2015) saling bernegosiasi dan menemukan titik-titik kesepahaman/kesepakatan bersama. Konsensus yang dibangun dapat meningkatkan kinerja pribadi di tempat kerja dengan menemukan kondisi win-win solution untuk setiap masalah (Christiyanto.S, 2016) Komunikasi dan informasi merupakan unsur dan faktor penting yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana. Tentunya bila kita melihat pentingnya komunikasi dan informasi dalam implementasi kebijakan, hal ini memudahkan terjadinya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan implementasi kebijakan publik. Seperti yang dikatakan Kepala Desa Dendun (Desa yang letaknya jauh dari ibu kota Kecamatan Mantang), tentang pentingnya dalam komunikasi mengatakan :

“Walaupun kondisi geografis wilayah Desa Dendun jauh dari Ibu Kota Kecamatan Mantang, namun dalam komunikasi sangat tidak ada masalah, sangat jelas dan dapat dipahami, sehingga tidak terjadi kesalah artian dalam komunikasi”

Komunikasi kebijakan dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah secara integrasi dari semua pihak, baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan pemahaman dan pengetahuan khususnya bagi para kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa serta masyarakat tentang kedudukan dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

Sumberdaya informasi juga termasuk kewenangan yang belum cukup mendukung. Hali ini dapat dilihat dari pernyataan Camat Mantang Kabupaten Bintan. Ketika ditanya tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan pembinaan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan terhadap tugas-tugas yang ada ditingkat kecamatan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat Mantang Kabupaten Bintan, menjelaskan :

“Terkadang program yang masuk dikecamatan yang dilaksanakan baik oleh pusat maupun pemprov maupun kabupaten ada yang tidak diketahui oleh camat sehingga kami kesulitan untuk melakukan pengawasan.”

Menurut Winarno (2005), faktor-faktor penyebab ambiguitas informasi dalam implementasi kebijakan publik terutama terkait dengan kompleksitas kebijakan, tidak adanya konsensus tentang tujuan kebijakan publik, masalah pengenalan kebijakan baru, dan kecenderungan untuk menghindari tanggung jawab politik bersama (Jamaluddin et al., 2019).



Gambar 2. Pelayanan pemerintah kabupaten Bintan

Sumber: bintankab.go.id

Kualitas pelayanan publik adalah keadaan yang dinamis (Trisakti et al., 2019) Pemerintah menangani komunikasi dengan baik, saluran komunikasi yang efektif perlu dibangun dan dikembangkan. Semakin banyak saluran komunikasi yang mapan dikembangkan, semakin besar kemungkinan perintah akan disampaikan dengan benar. Dalam menegakkan ketertiban umum di Kecamatan Pemalang Prefektur Bintan, pesan yang disampaikan adalah konsep umum menjaga ketertiban umum. Komunikasi yang baik membutuhkan pembangunan dan pengembangan saluran komunikasi yang efektif. Semakin banyak saluran komunikasi yang mapan dikembangkan, semakin besar kemungkinan perintah akan disampaikan dengan benar.

Sikap Aparatur Pemerintah dan Sumber Daya Manusia

Sumber daya penting dari Peraturan Pemerintah No. 17/2018 adalah kecukupan staf dan keahlian yang sesuai di setiap organisasi mesin daerah. Artinya, pegawai kantor kecamatan harus merupakan orang yang tepat dalam menjalankan tugasnya, memiliki informasi yang jelas, memahami kebijakan yang berlaku, memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pokoknya, dan memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokoknya. Kecamatan adalah merupakan pulau ditengah lautan sehingga tentunya keadaan georafis Kecamatan Kabupaten Bintan lautan lebih mendominasi dari pada daratan. Sumber Daya Manusia / Aparatur Kecamatan Mantang terdiri dari beberapa golongan diantaranya:

Tabel 1. Keadaan Pegawai Kecamatan Mantang berdasarkan Golongan

No	Gol.	Struktural (orang)	Staf (orang)
1	II/b	-	2
2	II/c	-	1
3	III/a	1	2
4	III/b	2	-
5	III/c	1	-
6	III/d	2	-
7	IV/a	2	-
	Jumlah	8	5

Sumber: Kecamatan Mantang, 2023

Berdasarkan Tabel 1. diatas dapat dilihat bahwa keadaan pegawai Kecamatan Mantang berdasarkan golongan terdiri dari pegawai dengan jabatan Struktural sebanyak 8 orang dan staf sebanyak 5 orang. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari selain Pegawai Negeri Sipil juga dibantu oleh tenaga honorer yang berjumlah 15 orang.

Faktor yang sangat penting yang tidak dapat diabaikan adalah pengaturan perangkat. implementasi kebijakan transparansi manajemen keluha efektif ketika, ketika mempekerjakan peralatan, ada kesadaran yang kuat bahwa mereka tidak hanya perlu melakukan apa yang perlu dilakukan dan memiliki keterampilan untuk melakukannya, tetapi juga kebutuhan untuk menerapkannya. pengarahannya Secara umum, atau hampir, relasi mesin dengan urusan politik masih menggunakan metode implementasi kebijakan klasik. Dalam artian kita masih menunggu terwujudnya produk politik dengan atau tanpa prakarsa mesin.

Kecamatan Subdistrict	Sekolah/Schools					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Teluk Bintan	4	4	-	-	4	4
Bintan Utara	3	3	2	2	5	5
Teluk Sebong	4	4	1	1	5	5
Seri Kuala Lobam	2	2	-	-	2	2
Bintan Timur	5	5	1	1	6	6
Gunung Kijang	3	3	-	-	3	3
Mantang	2	2	-	-	2	2
Bintan Pesisir	3	3	-	-	3	3
Toapaya	1	1	-	1	1	2
Tambelan	1	1	-	-	1	1
Bintan	28	28	4	5	32	33

Gambar 3. Lembaga Pendidikan di Kabupaten Bintan

Sumber: BPS Bintan, 2021

Komitmen dan konsistensi membentuk sikap mesin, untuk mencapai hasil politik yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh setiap mesin, karena misinya mengembannya. Hal ini dapat mendorong inisiatif dan gagasan baru sebagai bagian dari keberhasilan kebijakan keterbukaan Kabupaten Bintan. Berdasarkan pernyataan tersebut, situasi saat ini menunjukkan bahwa transparansi masih dilaksanakan di tingkat manajemen, sementara kesadaran di tingkat manajemen masih kurang.

Struktur Organisasi Pelayanan Pemerintah Kecamatan

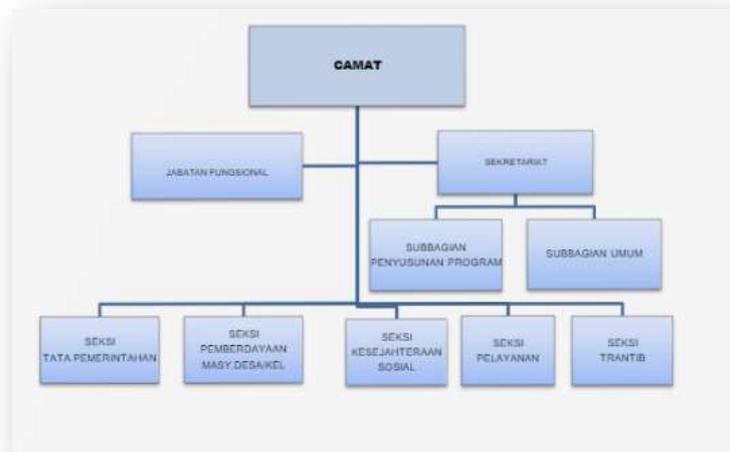
Suatu proses dalam suatu organisasi merupakan resep untuk mencapai hasil dalam suatu organisasi yang telah dilaksanakan secara efektif (Widya Wicaksono & Evander Yosaputra Lesnusa, 2022) Tingkat kecamatan, karena lemahnya pengelolaan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah kecamatan, lemahnya kedudukan, kewenangan dan kapasitas. . Kabupaten yang sejajar dengan kabupaten yang masih memiliki ciri geografis pulau-pulau terpencil tentu membutuhkan dukungan infrastruktur mangga.Reformasi ini mencari gejala ketegangan antar daerah. Kepala Desa Mantang Besar, mengemukakan :

“Diharapkan pemerintah kecamatan dapat melakukan pembinaan kedesa-desanya setiap bulannya baik pembinaan administrasi pemerintahan maupun pembinaan aparatur desa supaya kami dapat lebih memahami keberadaan pemerintahan kecamatan.”

Semua keadaan di atas mengarahkan untuk menyimpulkan bahwa realitas desentralisasi dalam upaya reformasi perspektif kelembagaan adalah bahwa desentralisasi berbanding terbalik dengan kontrol politik birokrasi (Muriany & Ruhunlela, 2021) Posisi struktural sangat strategis, sehingga kemungkinan untuk menjalankan kepentingan politik dan lainnya sangat terbuka (Atmojo, 2019)

Sedangkan ditanya tentang, apakah ada kesulitan dengan kedudukan pemerintah desa yang saat ini secara struktural tidak lagi berada dibawah pemerintah kecamatan, jika ada bentuk hubungan yang bagaimana sebaiknya diterapkan.

Secara umum, semua responden menunjukkan bahwa struktur birokrasi didefinisikan dengan jelas, SOP dapat diakses dan dipahami karena SOP adalah bagian dari pekerjaan sehari-hari manajer/karyawan dan hampir semua responden menunjukkan bahwa ada standar lead time. Kebutuhan akan manajemen yang efektif sangat penting dalam praktik, terutama dalam organisasi layanan sumber daya manusia (Nurwahyuliningsih et al., 2022) Manajemen, tidak yakin karena kendala/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PP No. 17/2018 tentang Kelurahan. struktur birokrasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas organisasi (Rustandi, 2021).



Gambar 4. Struksur Organisasi Kecamatan

Sumber: sakip.bintankab.go.id

Pada prinsipnya, layanan nirlaba mencakup bidang kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, peran negara adalah menyediakan berbagai layanan publik yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari bentuk regulasi atau layanan lain yang memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan publik. jasa dan lain-lain. . Sistem Layanan Transparansi dibentuk sesuai Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 bahwa KPPU merupakan lembaga independen yang mengemban misi memberikan layanan penyelesaian sengketa melalui mediasi terkait dengan hak setiap orang untuk mengakses informasi (Arifin Tahir, 2014)

Sumber daya dibawa ke dalam organisasi sebagai masukan sebagai sistem dengan implikasi keuangan dan teknologi. Dari perspektif ekonomi, sumber daya mengacu pada biaya atau pengorbanan langsung yang dilakukan oleh organisasi yang mencerminkan nilai atau manfaat potensial yang dapat diperoleh dari mengubahnya menjadi hasil. Implementasi yang efektif terjadi ketika pembuat keputusan tahu apa yang mereka lakukan. Informasi yang diketahui oleh pengambil keputusan hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik. Pertama pengiriman. Saluran komunikasi yang baik juga dapat menghasilkan implementasi yang baik. Kedua, kejelasan. Komunikasi yang diterima dari pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau ambigu.

Ketiga, konsistensi. Perintah yang diberikan dalam komunikasi harus konsisten dan tidak ambigu agar dapat disampaikan atau dilaksanakan. Dalam kaitan ini, pembuat kebijakan harus memiliki kemauan, kemauan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan yang ada.

Kecenderungan/kondisi merupakan faktor yang penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Adanya kekurangan pada struktur birokrasi dapat menjadi penghambat implementasi kebijakan PP. 19/2008 di kota tua Bintan.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada Kantor Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau tingkah laku struktur birokrasi. Aspek komunikasi sudah berjalan melalui komunikasi langsung dan tidak langsung. Faktor penghambat implementasi terkait pada jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kecamatan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Perlu komitmen dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat serta aparatur kerkerait lainnya selaku implementor dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 dan sesuai ketentuan dan peraturan yang jelas, didukung oleh komitmen kuat Bupati Bintan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. I., dan W. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2):, 92-113.
- Agus Purwanto, E. dan D. R. S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, Dan Masalah-masalah Sosial. Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, Dan Masalah-masalah Sosial* (Gaya Media).
- Alfarizi, M. A. (2018). Mplementasi Kebijakan Publik Indonesia Terhadap Kebijakan Selektif Keimigrasian Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2011. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), 169–178.
- Ananda, R. F., Rosyidi, B., & Zetra, A. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020. *Jurnal Niara*, 14(1), 149–160. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.5978>
- Arifin Tahir. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Gorontalo. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, XVI(03), 1–23.
- Atmojo, M. E. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Pejabat Struktural Eselon Ii Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 10. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i1.1419>
- Damanik, D. H., & Iskandar, D. D. (2019). Strategi Pengembangan Desa Wisata: Studi Kasus Desa Wisata Ponggok. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 19(2), 120–127. <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/31944>
- Ed, Y. (2015). *Implementation of Public Policy*.
- Hadi, S. (2000). *Metodologi Research I*. Andi Offset.
- Ismandianto, D. (2019). *Model Komunikasi Pemerintahan Kota Tanjung Pinang*. 21–34.
- Jamaluddin, Rawali, S., & Purnamawati, N. (2019). Pentingnya Komunikasi dan Informasi dalam Impementasi Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2014. *Mutakalimin*, 2(2), 1–12.
- Mansur, J. (2021). *IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK*. 6(2), 94–109.

- Muriany, T., & Ruhunlela, V. (2021). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p1-20>
- N.D, R. (2017). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. (PT. Elex M).
- Nurwahyuliningsih, E., Akhmad Nulhaqim, S., & A. Rachim, H. (2022). Kepemimpinan Dan Pengambilan Keputusan Pada Organisasi Layanan Manusia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(Vol. 13 No. 2, Juni 2022), 136–145. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5310>
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rustandi, R. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Kesehatan Terhadap Efektivitas Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Pasien Rawat Jalan Dan Inap (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 72–82. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i1.3483>
- Saadah. (2017). *Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin PNS di Sekda Kab Muaro Jambi*.
- Samodra.W.Dk. (2017). *Evaluasi Kebijakan Publik* (Raja Grafi).
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(Query date: 2022-09-13 08:36:55), 713–722. <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320>
- Situmorang, C. H. (2016). *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)* (SOCIALSECU).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Tri Asyafin Putra, M. A., & Widiyarta, A. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, Dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya). *Jurnal Academia Praja*, 5(2), 128–143. <https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.973>
- Widya Wicaksono, K., & Evander Yosaputra Lesnusa, C. (2022). Manajemen Proses Pengelolaan Sampah Oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung: Studi Kasus Di Pasar Kordon Studi Kasus Di Pasar Kordon. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(Vol. 13 No. 2, Juni 2022), 84–94. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5162>
- Wijaya, R., & Aprilia, R. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(2), 75–83. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1377>